

## **ANALISIS KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP KESIAPAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 PADA SALAH SATU FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

**Atikah, Ida Wahyuni, Ekawati**

Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas X

Email : [atikahzuher@gmail.com](mailto:atikahzuher@gmail.com)

**Abstract :** *Public health faculty X University is one of the working area that contain high level potential hazard which under working more than 100 workers. According to the characteristic, Public Health X university should implement safety and health management system according to Government Law No. 50 year 2012. However, until now, they have not already implemented safety and health management system. One of the fundamental principal to safety and health management system is commitment. The purpose of this research was to analyse how far the leader commitment towards institution readiness through implementation safety and health management system. The method of this research was qualitative research with in depth interview and observational approach. Interviews were conducted to top leader on public health faculty with triangulation to supportive party on safety and health management system faculty, such as Vice Dean II and Chairman of logistic and administration. Result showed that leader commitment form could be observed by resources through the availability of safety and health expertise, funding, facility and infrastructure, communication on safety induction or safety signates, and training to occupational safety and health student. No rules to regulate implementation safety and health management system in X University finally made the implementation of safety and health management system were not become the priority. Public Health Faculty X can make initiation to implement safety and health management system around X University with safety communication, safety maintenace, and emergency response preparedness simulation.*

**Keyword :** *Leader Commitment, Safety and Health Management System*

### **PENDAHULUAN** **Latar Belakang**

Era globalisasi merupakan salah satu tuntutan dari perkembangan zaman dimana penerapan K3 menjadi salah satu isu penting di dalam dunia industri dan jasa. Meningkatnya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dan ditemukannya penyakit akibat kerja menjadi pendorong diterapkannya K3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya perlindungan kepada tenaga kerja

terhadap bahaya dari akibat kecelakaan kerja.<sup>(1)</sup>

Universitas sebagai salah satu tempat penghasil sumber daya manusia juga memiliki potensi bahaya. Potensi bahaya yang ada sering tidak disadari oleh pihak - pihak yang terlibat di dalam lingkungan universitas dikarenakan belum adanya standar penilaian dan rendahnya sosialisasi atau pembelajaran mengenai K3.

Data menunjukkan telah terjadi beberapa kecelakaan kerja di

lingkungan universitas, salah satunya pada tahun 2014 terjadi kebakaran di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dimana arsip, buku, dan rujukan ilmu musnah terbakar.<sup>(2)</sup> Selain itu, pada tahun 2015 kembali terjadi ledakan di tempat yang sama, tepatnya di laboratorium kimia Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dimana 14 mahasiswa mengalami luka-luka.<sup>(3)</sup> Melihat potensi bahaya yang ada di universitas, maka penerapan K3 di lingkungan universitas perlu untuk dilakukan.

Masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam organisasi secara keseluruhan. Pola - pola yang harus dikembangkan dalam penanganan bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta pengadaan pengendalian potensi bahaya harus mengikuti pendekatan sistem yaitu dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 5 Ayat 2 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 menyatakan bahwa setiap tempat kerja yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem manajemen K3.<sup>(4)</sup> Untuk menerapkan sistem manajemen K3 tersebut, suatu perusahaan wajib berpedoman pada lima prinsip berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012, salah satunya adalah komitmen yang harus diterapkan sebagai langkah awal dalam penerapan sistem manajemen K3.

Komitmen ibarat energi yang menggerakkan roda kebijakan K3 organisasi. Jika pihak manajemen mempunyai komitmen yang kuat, maka akan ada banyak cara yang dilakukan agar SMK3 berjalan

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk iklim K3 di organisasi dan memotivasi seseorang untuk mampu melakukan tugas dengan sehat dan selamat.<sup>(5)</sup> Semakin terlibatnya senior eksekutif dalam level operasional, maka akan semakin mempengaruhi tingkat K3 di suatu organisasi. Komitmen tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis, melainkan diwujudkan dalam suatu usaha nyata yang menunjukkan pihak manajemen atau pimpinan berkomitmen terhadap K3.<sup>(6)</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X merupakan salah satu fakultas terbaik di Indonesia dengan akreditasi A. Saat ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X memiliki tenaga kerja ± 100 orang dan ± 400 mahasiswa setiap angkatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X diantaranya gedung dekanat, gedung perkuliahan, gedung administratif, gedung serbaguna, perpustakaan, laboratorium komputer, mushola, pusat kegiatan mahasiswa, studio musik, dan kantin. Selain itu, FKM Universitas X juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium gizi dan laboratorium terpadu.

Aktivitas pendidikan di FKM Universitas X tidak akan terlepas dari potensi bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pada tahun 2013 terjadi kebakaran di ruang peminatan biostatistika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X dimana kecelakaan tersebut menyebabkan hilangnya dokumen penting peminatan biostatistika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan, melalui wawancara dengan ketua tim pengembangan SMK3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X akan menerapkan sistem manajemen K3 setelah Universitas X ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Untuk itu, beberapa persiapan telah dilakukan, salah satunya menunjuk salah satu tenaga kerja untuk mengikuti pelatihan Ahli K3 Umum sebagai Ahli K3. Akan tetapi, sampai saat ini, penerapan sistem manajemen K3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X belum dapat dilakukan dikarenakan beberapa kendala dalam hal persiapan penerapan SMK3, salah satunya ketiadaan personil untuk mengembangkan sistem manajemen K3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai komitmen pimpinan terhadap kesiapan penerapan SMK3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana komitmen pimpinan terhadap kesiapan penerapan SMK3 di FKM Universitas X.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana informan utama dalam penelitian ini adalah Dekan FKM Universitas X. Sedangkan informan triangulasi dalam penelitian ini adalah pihak yang menginisiasi penerapan sistem manajemen K3 di FKM Universitas

X, pembantu dekan II, dan kepala sub bagian UPA.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam kepada informan utama dan informan triangulasi sebagai penguat. Pengumpulan fakta dari fenomena atau peristiwa - peristiwa yang bersifat khusus, kemudian masuk pada kesimpulan yang bersifat umum.

Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber yaitu dengan mengumpulkan bukti atau jawaban dari berbagai sumber berbeda.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Karakteristik Informan**

Penelitian ini mengambil satu orang informan utama yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 46 tahun. Masa jabatan informan utama adalah 22 tahun dengan pendidikan terakhir S3. Untuk saat ini, informan menjabat sebagai Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas X dengan tugas dan kewajiban informan adalah membuat kebijakan strategis jangka panjang.

Informan triangulasi pada penelitian ini adalah Kepala Bagian K3, Dosen Bagian K3, Pembantu Dekan II, dan Kepala Sub Bagian UPA. Pemilihan informan triangulasi didasarkan pada pengetahuan dan kewenangan informan triangulasi. Informan triangulasi yang pertama dan kedua adalah Kepala Bagian K3 dan Dosen bagian K3 yang berperan sebagai pihak yang menginisiasi penerapan SMK3 di FKM Universitas X. Informan triangulasi ketiga adalah Pembantu Dekan II yang bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset, dan logistik. Informan triangulasi

keempat adalah Kepala Sub Bagian UPA yang berperan dalam mengatur sarana dan prasarana di FKM Universitas X.

### **B. Analisis Kebijakan K3**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh informan utama dan triangulasi terkait kebijakan K3 dapat disimpulkan FKM Universitas X belum memiliki kebijakan K3 secara tertulis, tertanggal, ditandatangani, jelas menyatakan tujuan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja K3. Menurut informan, kebijakan K3 akan ditetapkan secara terpusat satu universitas, sehingga kebijakan K3 di FKM Universitas X sampai saat ini belum ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001 yang menyebutkan bahwa kebijakan K3 harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani agar diketahui dan dibaca oleh semua pihak.

### **C. Analisis Komunikasi K3**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi K3 yang dilakukan di FKM Universitas X meliputi *safety induction*, dan penempelan rambu K3. Awalnya *safety induction* hanya diberikan untuk kegiatan K3, namun saat ini beberapa acara di luar K3 sudah mulai memberikan *safety induction*. Terkait efektifitas komunikasi K3 yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan sampai saat ini belum efektif. Seharusnya *safety induction* juga diberikan kepada pihak lain dan tidak hanya dilakukan satu kali. Hal ini tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001 yang menyebutkan bahwa komunikasi tidak dilakukan secara umum

melainkan bertingkat ke semua pihak, termasuk kontraktor dan pengunjung lainnya.

Untuk rambu K3, berdasarkan observasi yang dilakukan, juga masih banyak ditemukan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut antara lain beberapa rambu K3 banyak yang sudah mulai memudar dan ukuran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga rambu K3 tidak terbaca, khususnya tanda jalur evakuasi. Selain itu, beberapa APAR juga belum memiliki tanda APAR. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker No 04 Tahun 1980 yang menyebutkan bahwa setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, mudah dicapai, dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.<sup>(7)</sup>

### **D. Analisis Sumber Daya K3**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan triangulasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki FKM Universitas X dalam bidang K3 antara lain ketersediaan Ahli K3 Umum, anggaran, dan sarana prasarana. Hal ini sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan SMK3 dibutuhkan berbagai macam sumber daya antara lain sumber daya manusia di bidang K3, anggaran, sarana dan prasarana. Akan tetapi, sumber daya K3 di FKM Universitas X masih perlu dilengkapi dikarenakan FKM Universitas X belum membentuk P2K3. Dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana K3, FKM Universitas X juga belum melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, khususnya APAR. FKM Universitas X hanya melakukan

pengisian ulang APAR ketika kegiatan praktikum berlangsung. Hal ini tidak sesuai dengan Permenaker No 04 Tahun 1980 pasal 11 yang menyebutkan bahwa setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 kali dalam setahun yaitu jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan.<sup>(7)</sup>

#### **E. Analisis Tugas dan Wewenang K3**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan informan triangulasi dapat disimpulkan bahwa FKM Universitas X belum menetapkan struktur organisasi dan tanggung jawab di bidang K3. FKM Universitas X hanya memiliki bagian K3, dimana pelaksanaan K3 di FKM Universitas X dibantu oleh dosen dan mahasiswa peminatan K3 itu sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001 yang menyebutkan bahwa seorang pimpinan harus menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat di bidang K3. Peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang di bidang K3 harus didokumentasikan dan dikomunikasikan agar setiap pekerja tahu siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil tindakan untuk masalah K3.

#### **F. Analisis Partisipasi Pimpinan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dan informan triangulasi dapat disimpulkan bahwa pimpinan belum memastikan tindakan koreksi telah dilakukan. Pengawasan yang dilakukan tidak terkait dengan K3, melainkan pengawasan terkait kebersihan dan fasilitas. Memo juga tidak diberikan untuk memastikan

tindakan koreksi telah dilakukan. Rapat khusus terkait K3 juga belum dilakukan. Sampai saat ini, pimpinan hanya melakukan diskusi secara informal dengan dosen bagian K3 terkait masalah K3 di lingkungan FKM Universitas X. Pimpinan juga belum pernah terlibat dalam investigasi kecelakaan dan sampai saat ini prosedur investigasi kecelakaan belum ditetapkan. Untuk *reward*, pemberian *reward* juga belum dilakukan. Hal ini tidak sesuai dengan ISRS sub proses kepemimpinan terkait komitmen manajemen. Akan tetapi, pimpinan secara berkala sudah mengkomunikasikan keinginan dan harapannya mengenai K3. Hal ini telah sesuai dengan ISRS yang menyebutkan bahwa komitmen diwujudkan dalam bentuk pimpinan berpartisipasi aktif mempromosikan budaya K3.

#### **G. Analisis Pelatihan K3**

Berdasarkan hasil wawancara informan utama dan informan triangulasi dapat disimpulkan bahwa FKM Universitas X belum melakukan pelatihan terkait K3. Untuk saat ini pelatihan terkait K3 masih difokuskan pada praktikum mahasiswa K3 mengenai tanggap darurat kebakaran dan pertolongan pertama. Pelatihan belum dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Hal ini tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 dan OHSAS 18001.

FKM Universitas X juga belum memiliki sistem penanggulangan keadaan darurat, belum membentuk tim tanggap darurat, belum melakukan pengujian terhadap program penanggulangan keadaan darurat, dan belum memiliki prosedur penanggulangan keadaan darurat. FKM Universitas X baru memiliki sistem pertolongan pertama dengan menjadikan KSR sebagai

posko penanganan keadaan darurat. Hal ini tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penanggulangan keadaan darurat haruslah mempunyai prosedur keadaan darurat serta diuji secara berkala.

#### H. Analisis Perencanaan K3

Berdasarkan wawancara dengan informan utama dan informan triangulasi dapat disimpulkan bahwa FKM Universitas X telah melakukan banyak program K3. Akan tetapi, perencanaan program secara tertulis belum ditetapkan. Program K3 dibuat berdasarkan insiden atau catatan K3 sebelumnya yaitu FKM Universitas X pernah mengalami kebakaran pada tahun 2013. Hal ini tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa perencanaan K3 dibuat dengan mempertimbangkan potensi bahaya yang ada. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nujhani dan Juliantana yang menyebutkan bahwa rencana strategi harus memuat prosedur yang terdokumentasi dengan menimbang identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada tahap melakukan perencanaan ataupun perencanaan ulang.<sup>(9)</sup>

Menurut informan, perencanaan belum dilakukan dikarenakan belum adanya lembaga atau organisasi K3 di FKM Universitas X. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahimah Azmi yang menyebutkan bahwa perencanaan yang dilakukan perusahaan dikategorikan baik karena perencanaan dilakukan di tingkat pusat dan yang ikut merumuskannya adalah P2K3 tingkat pusat.<sup>(10)</sup>

#### Kesimpulan

1. Komitmen pimpinan dalam hal sumber daya K3 dapat dilihat melalui beberapa sumber daya yang dimiliki berupa adanya Ahli K3 umum, anggaran, dan sarana prasarana.
2. Komitmen pimpinan dalam hal komunikasi K3 dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan berupa *saety induction* dan pemasangan rambu K3.
3. Komitmen pimpinan dalam hal partisipasi diwujudkan dalam mengkomunikasikan keinginan dan harapannya mengenai K3 kepada semua pemangku kepentingan. Secara khusus rapat K3, memastikan tindakan koreksi, dan pemberian *reward* belum dilakukan.
4. Komitmen pimpinan dalam hal pelatihan K3 dapat dilihat dari praktikum untuk mahasiswa peminatan K3.
5. Pimpinan belum berkomitmen dalam hal tugas dan wewenang K3 dikarenakan belum adanya personil khusus terkait K3 yang ditetapkan.
6. Pimpinan belum berkomitmen dalam hal perencanaan K3 dikarenakan rencana program K3 belum ditetapkan secara tertulis.
7. Tidak adanya peraturan yang mengatur terkait penerapan K3 di lingkungan Universitas X membuat penerapan sistem manajemen K3 belum menjadi prioritas. Tidak adanya prioritas membuat Universitas X belum mengalokasikan mata anggaran khusus terkait penerapan SMK3. Tidak adanya mata anggaran menjadi salah satu hambatan dalam penerapan SMK3 di lingkungan FKM Universitas X.

### Daftar Pustaka

1. Tarwaka. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Manajemen Keselamatan dan Implementasi K3 di Tempat Kerja)*. Surakarta: Harapan Press; 2008.
2. Mardiani, D. *Dosen: Kebakaran di Gedung FISIP - UI Tragedi Akademis*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/09/mz4ck3-dosen-kebakaran-gedung-fisipui-tragedi-akademis> diakses 4 Maret 2016.
3. Virdhani, M H. *Kecelakaan di Lab Kimia UI, 14 Mahasiswa Terluka*, <http://news.okezone.com/read/2015/03/16/338/1119515/kecelakaan-di-lab-kimia-ui-14-mahasiswa-terluka> diakses 4 Maret 2016.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. 2012.
5. O' Toole. *The Relationship Between Employee' Perceptions of Safety Organizational Culture*. *Journal of Safety Research*. 2002; 33, 231–243.
6. Ramli, S. *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta: Dian Rakyat; 2010.
7. Peraturan Pemerintah dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. 1980.
8. Juliantina, I dan Jula N. *Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Persiapan Lahan Pusri II B PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*. 2013; 1 (1).
9. D, Rahimah Azmi. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara; 2008.